

PARTISIPASI PROFESI HUKUM (ADVOKAT) SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEWIBAWAAN HUKUM¹

Oleh :
Anggini Debora Monika Paloon²
Jolanda M. Korua³
Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran utama profesi hukum (advokat) dalam upaya meningkatkan kewibawaan hukum di masyarakat dan untuk mengkaji bentuk partisipasi profesi hukum (advokat) sebagai penegak hukum dalam upaya meningkatkan kewibawaan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Peran seorang Advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen Advokat sebagai penegak hukum mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana. 2. Pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat kepada masyarakat, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat. Berpartisipasi dalam memberikan Masyarakat pelayanan hukum dan perlindungan hukum.

Kata Kunci : *advokat, penegak hukum, kewibawaan hukum*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Bagi professional hukum dalam menjalankan fungsi

keprofesionalannya dilengkapi dengan rambu-rambu dalam arti luas, yaitu rambu-rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu-rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan.⁵

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang damba kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu.⁶

Etika dan moral meliputi aspek-aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas, terutama dalam hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya, antara lain dalam kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan atau profesi. Seperti halnya penggugat dengan hakim, advokat dengan kliennya, jaksa dengan terdakwa, dan notaris dengan jasa kenotariatannya. Dalam konteks etika profesi, kode etik advokat di Indonesia berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku dan tindakan advokat dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengembang suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengembangkan dan melaksanakan tugas dan fungsi profesi, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101422

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Shidarta, 2009, "Moralitas Profesi Hukum", Refika Aditama: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Cetakan ke-2, Bandung, hal. 107-108.

⁶ Supirman Rahman & Nurul Qamar, 2014, "Etika Profesi Hukum", Refleksi, Makassar, hal. 4.

Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum yang biasa populer di era digital adalah hakim, jaksa, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya diperlengkapi dengan rambu-rambu dalam arti luas, yaitu rambu-rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu-rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.⁷

Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dapat diwujudkan. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Pada umumnya orang Indonesia mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sehalus mungkin. Suatu kompromi lebih disukai dari pada jatuhnya keputusan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dengan harapan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tersebut berakar pada nilai sosial-budaya yang dinamakan *shame-culture* (segala emosi yang melibatkan orang lain dan sanksi eksternal) yang dapat ditemukan pada kebanyakan masyarakat di Asia termasuk Indonesia.

Khususnya di Indonesia, peranan kalangan hukum profesional masih terlalu sedikit. Yang dimaksudkan dengan ahli hukum adalah orang-

orang yang secara profesional hidup dari keahliannya di bidang hukum, seperti halnya pengacara, notaris, hakim. Menurut Rueschemeyer :...*professions are conceived of as service occupations that (1) apply a systematic body of knowledge to problems which (2) are highly relevant to central values of the society.*" (Profesi dipahami sebagai pekerjaan layanan yang (1) menerapkan badan pengetahuan sistematis untuk masalah yang (2) sangat relavan dengan nilai-nilai sentral Masyarakat). Kalangan hukum profesional dianggap mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dipunyai warga masyarakat lainnya, sehingga apabila ada masalah-masalah hukum, para ahli hukum dianggap sebagai ahli untuk mengatasinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi oleh penegak hukum berarti Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah kehilangan kewibawaannya. Mahkamah Konstitusi⁸ merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan Negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena Negara modern abad ke-20. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agama. Oleh karena itu, pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pengabaian terhadap putusan pengadilan.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat

⁷ Ibid. hal. 5.

⁸ M. Ali Safaat. dkk, 2010, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 5-10

pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan advokat juga merupakan bentuk dukungan terhadap hak asasi manusia. Melalui perannya dalam memberikan bantuan hukum kepada individu yang membutuhkan, advokat turut memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung tanpa adanya diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi Advokat dalam menjalankan profesiinya. Selain Undang-undang, Advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya keadilan progresif volume 11 Nomor 2 Maret 2021 127 dalam menjalankan profesiinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesiinya berada dibawah perlindungan hukum, undangundang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaanya oleh hukum dan statusnya sebagai penegak hukum. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "advokat

berstatus sebagai penegak hukum" adalah : advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan⁹. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai pengawas integritas sistem peradilan, penyeimbang kekuasaan, dan penyedia jasa hukum yang berkualitas.

Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Makna Advokat berstatus sebagai penegak hukum ialah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Salah satu tantangan besar yang dihadapi advokat adalah bagaimana mereka dapat menegakkan hak imunitas mereka dalam melakukan praktik pidana. Kode etik ini mewajibkan advokat untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan profesional, serta menghindari perilaku tercela yang dapat merugikan reputasi profesi hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran utama profesi hukum (Advokat) dalam upaya meningkatkan kewibawaan hukum di masyarakat?
2. Bagaimana bentuk partisipasi profesi hukum (Advokat) sebagai penegak hukum dalam upaya meningkatkan kewibawaan hukum?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Utama Profesi Hukum (Advokat) Dalam Upaya Meningkatkan Kewibawaan Hukum Di Masyarakat

Masyarakat sebagai subjek hukum membutuhkan Advokat untuk membantu menegakkan keadilan. Sasaran menghadirkan Advokat adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam

⁹ Melina Anggraini, Mutiara Sachputri,Fauziah Lubis" Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum",Pengabdian Masyarakat, 3 No 3, 2023, hal 633

menemukan kebenaran. Sehingga Advokat dianggap sebagai penegak hukum¹⁰.

Istilah Penasihat Hukum/Bantuan Hukum dan Advokat/Pengacara merupakan istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat, bila dibandingkan dengan istilah pembela. Karena istilah pembela dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil walaupun itu bertolak dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka/terdakwa.

Advokat berasal dari kata advocate, yakni seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan. Terjemahan lain menyatakan bahwa advocate bermakna sebagai nasihat. Advokat bisa dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini semakin penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum.

Penegakan hukum yang merupakan unsur terpenting suatu Negara Hukum dilakukan oleh para penegak hukum salah satunya adalah Advokat. Pelaksanaan tugas advokat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah profesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. Lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. "Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien".¹¹

Advokat adalah profesi yang sangat terhormat (*noble officium*). Mengenai peran Advokat sebagai penegak hukum sejatinya masih ada yang beranggapan adanya ambevalensi terhadap profesi Advokat, disatu pihak Advokat dianggap profesi yang menghalangi kerja aparatur, disisi lain, siapa lagi yang dapat menolong orang yang sedang berpekerjaan dalam pengadilan kalau bukan Advokat.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat seolah memisahkan diri dari campur tangan lembaga peradilan lainnya. Yang mana sebelumnya dalam hal pengangkatan seorang advokat melalui Menteri Kehakiman setelah lulus ujian yang dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa "yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat". Dan dalam ayat ke (2) disebutkan bahwa "Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat". Sedangkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Advokat (berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat) adalah sebagai berikut:

- a. WNI;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pengawali negeri atau pejabat Negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi

Untuk menjaga profesionalisme di bidang profesi hukum, dalam Pasal 26 Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa:

¹⁰ Sukris Sarmadi, 2009, Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan), Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

¹¹ Rahmawati,"Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Masyarakat", https://www.ri.co.id/hukum/Peran_Advokat

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.¹²

Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peran Advokat/Penasehat Hukum sebagai bagian dari Pemberi Bantuan Hukum dalam Sistem peradilan Pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Mengingat peran advokat yang sentral dan fleksibel tersebut maka kedudukan fungsi dan tugas advokat sebagai penegak hukum dan profesi terhormat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan yang sama dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim, sehingga peran advokat tidak hanya terlekat pada pembelaan hak kliennya tetapi berfungsi juga sebagai cek and balances dalam proses peradilan yang mengontrol dan menyeimbangi penegak hukum lainnya. Sebagai pengawal dalam mewujudkan peradilan yang baik ia dapat menciptakan perdamaian dan mengawal kinerja ditingkat kepolisian, pembela harkat martabat manusia didepan hukum, menjadi penyeimbang atas dominasi dari penuntut umum yang dapat menuntut hak hukum masyarakat.

Dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam praktik profesi Advokat, dikenal adanya “*normative ethic*” yang terkandung ketentuan-ketentuan seperti:

1. Kewajiban pada diri sendiri;
2. Kewajiban-kewajiban bagi masyarakat umum;
3. Ketentuan-ketentuan tentang partnership;
4. Kewajiban terhadap orang atau profesi yang dilayani.

Tugas Advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/kliennya. Oleh karena itu, Advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya.

Advokat dapat melaporkan kesewenang-wenagan hakim dalam proses peradilan terhadap (Pasal 220 KUHAP), Serta dapat mengawal segala pelaksanaan putusan pengadilan baik dalam lapas maupun eksekusi lapangan. Jadi dalam litigasi peradilan advokat adalah pengawal dalam memastikan aturan hukum dilaksanakan dengan baik di negara Indonesia dan menjadi pengawas

dan penyeimbang dalam pelaksanaan peradilan oleh penegak hukum lainnya.

Hakikat advokat sebagai penegak hukum juga luas karena ia tidak hanya menjaga dan melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, melainkan dapat menguasai seluruh keilmuan hukum dan tidak dibatasi oleh satu keilmuan hukum saja oleh karena itu advokat dapat berpraktek dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kewenangannya, bahkan karena menguasai seluruh aturan hukum ia dapat menjaga tertib hukum di Indonesia seperti konsultan dan auditor pemerintahan, peradilan dan perusahaan dalam membentuk kebijakan dan Pembangunan.

Advokat juga dalam praktiknya dapat beracara di pengadilan manapun yang berlaku di Indonesia baik umum maupun khusus dan di Mahkamah Konstitusi, bahkan dapat ditunjuk dalam peradilan internasional dalam hal membela negara Indonesia. Penemuan-penemuan hukum banyak ditemui oleh advokat sebagai ahli hukum baik kelemahan peraturan maupun adanya hukum baru yang dapat diterapkan seperti hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat membantu peneliti, akademisi dan parlemen dalam memperbarui hukum nasional.

Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat fungsinya seperti:

- (1) pengangkatan,
- (2) pengawasan, dan
- (3) penindakan serta ketentuan bagi
- (4) pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang.

Di samping itu juga diatur berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam:

- (1) menegakkan keadilan serta
- (2) terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

Menurut pendapat Ahli, tidak dapat kita pungkiri, bahwa saat ini profesi Advokat yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab itu sangat diperlukan untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang bebas dari:

- (1) segala campur tangan dan
- (2) pengaruh dari luar.

Karena kekuasaan kehakiman yang independen itu semata-mata demi terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan bersih demi kepastian hukum bagi semua pihak agar:

- (1) keadilan,
- (2) kebenaran dan

¹² Serlika Aprita, ”Etika Profesi Hukum”, Palembang, Refika, 2019, hal 38

(3) hak asasi manusia itu terwujud dengan kokoh dan tegak sebagaimana yang semestinya bagi kehidupan manusia;

Dengan demikian menurut Ahli, Advokat itu:

(1) tidak boleh melakukan diskriminasi,

(2) tidak boleh mata duitan,

(3) tidak boleh memegang jabatan lain yang bertentangan dengan tugas dan martabat profesiya maupun jabatan yang meminta pengabdian yang merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesiya.

Menurut Ahli, materi muatan pokok yang terpenting dalam Undang-Undang Advokat adalah: tentang pengakuan bahwa Advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan Undang-Undang (pasal 5 ayat 1). Untuk menjaga kemandiriannya, maka Advokat mengatur dan mengurus sendiri profesiya dalam satu organisasi profesi Advokat (*self governing body*), tanpa campur tangan atau kontrol dari kekuasaan pemerintah.

Hal itu tercermin dari ketentuan bahwa organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat

Pasal 28 ayat (1);

Mengenai organisasi Advokat itu pun ditetapkan oleh para Advokat sendiri dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

Pasal 28 ayat (2);

Kemandirian tersebut dapat dilihat pada:

(1) proses pendidikan khusus profesi;

(2) ujian calon Advokat,

(3) magang;

(4) pengangkatan Advokat,

(5) pengawasan,

(6) penindakan sampai pemberhentian Advokat, semuanya diatur dan diurus sendiri oleh organisasi Advokat Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (1)]; Proses rekrutmen itu sendiri yang diberi kewajiban menerima calon-calon Advokat yang akan melakukan magang.

Pasal 29 ayat (5), dengan kewajiban memberikan bimbingan, pelatihan dan kesempatan praktik terhadap para calon Advokat pasal 29 ayat (6) adalah para Advokat yang menjadi anggota organisasi profesiya.

Dengan demikian menurut Ahli, ada 2 (dua) prinsip

(1) kebebasan dan kemandirian profesi Advokat dan

(2) organisasi Advokat yang mengurus dirinya sendiri (*self governing body*) yang menjadi roh (jiwa) ataupun semangat (*spirit*) dari Undang-undang Advokat; yang notabene dua prinsip tersebut telah 39 tahun diperjuangkan tetapi tidak pernah dapat diterima oleh pemerintah orde lama maupun orde baru.

Dalam rangka perlindungan terhadap profesi Advokat yang bebas dalam menjalankan tugas profesi yang menjadi tanggung jawabnya pasal 15 dan khusus di muka pengadilan, Advokat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan Perundang-undangan (pasal 14), maka Advokat pun tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesiya, asalkan dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam persidangan (pasal 16).

Advokat juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perUndang-undangan (pasal 17); Advokat juga berhak, bahwa dirinya wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesiya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Dalam hubungan ini Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan. Begitu pula perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (pasal 19).¹³

B. Bentuk Partisipasi Profesi Penasehat Hukum (Advokat) sebagai Penegak Hukum dalam Upaya Meningkatkan Kewibawaan Hukum

Partisipasi, keikutsertaan, peran serta, turut serta, penyertaan, atau pengikut (*participation*) adalah pengambilan bagian atau ikut serta. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi di mana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

¹³ H. Teguh Samudera,” “Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara PUU No. 63/PUU-XV/2017”,

Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Bentuk partisipasi yang nyata yaitu:

- 1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan asyarakat yang memerlukan bantuan
- 2) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas
- 3) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
- 4) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan gagasan, pendapat atau buah pikiran membangun; baik untuk program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Bentuk – Bentuk Partisipasi

Menurut Effendi, partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

- 1) Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahannya.
- 2) Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini
- 3) merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Ahli berpendapat, bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan

fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab adalah merupakan hal yang sangat penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Advokat, melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangsih berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan¹⁴.

Advokat Indonesia yang saat ini berada di bawah naungan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, merupakan salah satu profesi hukum (catur wangsa peradilan) yang independen. Sebagai sebuah profesi, Advokat dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan dan peningkatan profesionalitasnya dalam memberikan jasa dan bantuan di bidang hukum kepada para klien atau pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dengan kualitas layanan dan profesionalitas, diharapkan Advokat dapat menjadi profesi yang benar-benar ‘dipandang’ oleh masyarakat. Upaya meningkatkan kompetensi keahlian (*skill*), layanan dan peningkatan profesionalitas advokat dilakukan antara lain melalui pendidikan baik melalui seminar, pelatihan, workshop, diskusi, dan sebagainya.

Mungkin hampir seluruh Advokat pernah berpartisipasi di dalam seminar, pelatihan, workshop, atau diskusi baik sebagai peserta maupun pembicara. Partisipasi mereka adalah dalam rangka memperoleh tambahan pengetahuan yang mungkin berhubungan dengan kasus yang ditanganinya atau hanya sekedar menambah pengetahuan¹⁵.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

¹⁵ Muhammad Faiz, “Pendidikan Hukum Berkelanjutan Bagi Advokat”, <https://www.hukumonline.com/Pendidikan>

Hakikat advokat sebagai penegak hukum juga luas karena ia tidak hanya menjaga dan melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, melainkan dapat menguasai seluruh keilmuan hukum dan tidak dibatasi oleh satu keilmuan hukum saja oleh karena itu advokat dapat berpraktek dimanapun dan kapan pun sesuai dengan kewenangannya, bahkan karena menguasai seluruh aturan hukum ia dapat menjaga tertib hukum di Indonesia seperti konsultan dan auditor pemerintahan, peradilan dan perusahaan dalam membentuk kebijakan dan pembangunan.

Advokat juga dalam praktiknya dapat beracara di pengadilan manapun yang berlaku di Indonesia baik umum maupun khusus dan di Mahkamah Konstitusi, bahkan dapat ditunjuk dalam peradilan internasional dalam hal membela negara Indonesia. Apabila dilihat dari kedudukannya advokat seharusnya juga dapat menjadi (*The first way of problem solving*) yaitu Diskresi dalam menyelesaikan masalah diluar pengadilan (*Non-Litigasi*) seperti arbiter dan mediator hingga dapat membantu penyelesaian tanpa memperpanjang jalannya proses peradilan yang menumpuk hingga over kapasitas di lembaga permasyarakatan. Penemuan-penemuan hukum pun banyak ditemui oleh advokat sebagai ahli hukum baik kelemahan peraturan maupun adanya hukum baru yang dapat diterapkan seperti hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat membantu peneliti, akademisi dan parlemen dalam memperbaiki hukum nasional.

Kewenangan dan kekuatan Advokat sebagai kuasa hukum dari klien bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan padanya. Dalam lapangan hukum perdata, Advokat bertindak sebagai wakil dari klien secara litigasi di pengadilan perdata dimulai sejak pendaftaran perkara ke kepaniteraan sampai pada sidang dimuka pengadilan. Begitu pula dalam lapangan hukum pidana, Advokat bertindak sebagai wakil klien mulai dari tingkat pemeriksaan, penyidikan hingga di muka sidang pengadilan.

Advokat mempunyai prinsip kerja yang kemudian disebut dan direduksi menjadi kode etik profesi Advokat sebagai dasar pijakan seorang Advokat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa hukum maupun penegak hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 bahwa : “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat disusun kode etik profesi Advokat dan organisasi Advokat. Maka Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan

ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”.

Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip *Equality before the Law* yakni jaminan kesederajatan dihadapan hukum dan prinsip *Presumption of innocence* (Praduga tak bersalah).

Adapun tugas dan tanggungjawab yang diimbau Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
- 2) Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak , sesuai dengan nilai – nilai hukum moral dan agama;
- 3) Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
- 4) Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai norma hukum, agama, dan moral;
- 5) Melindungi klien dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
- 6) Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 7) Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
- 8) Menghindarkan diri dari berbentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
- 9) Bersikap simpatik dan turut mersakan apa yang diderita kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada pribdinya;
- 10) Antara kuasa hukum atau advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan;
- 11) Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- 12) Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang yang wajib memberi bantuan hukum

Advokat/Penasehat Hukum sebagai penegak hukum dapat bertindak mendampingi dan atau

mewakili dalam perkara perdata, TUN (Tata Usaha Negara) maupun pidana. Dalam perkara pidana tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara. Untuk mendapatkan penasehat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Bagi tersangka/terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih atau pidana mati, yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat bersangkutan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka yang memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Advokat bebas dan tanpa takut mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam siding pengadilan untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Hak karena undang-undang tersebut, merupakan kebebasan dari Advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan profesinya.

Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Untuk kepentingan pembelaan, Penasehat Hukum setiap saat dapat menghubungi dan berbicara dengan tersangka. Penasehat Hukum dapat meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada pejabat bersangkutan. Penasehat hukum tidak boleh dikurangi kebebasannya dalam berhubungan dengan tersangka¹⁶.

Para Advokat setiap saat harus mempertahankan kehormatan dan martabat profesi mereka sebagai bagian yang amat penting dari pelaksanaan keadilan.

Kewajiban para Advokat terhadap klien-klien mereka harus mencakup:

- (a) Memberi nasehat kepada para klien mengenai hak dan kewajiban hukum mereka dan mengenai fungsi dari sistem hukum sejauh bahwa hal itu relevan dengan berfungsinya sistem hukum dan sejauh bahwa hal itu berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum para klien;
- (b) Membantu para klien dengan setiap cara yang tepat, dan mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingannya;

- (c) Membantu para klien di depan pengadilan, majelis atau pejabat pemerintahan, di mana sesuai

Para Advokat dalam melindungi hak klien-klien mereka dan dalam memajukan kepentingan keadilan, akan berusaha untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan internasional dan setiap akan bertindak bebas dan tekun sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui. Para Advokat harus selalu menghormati dengan loyal kepentingan para klien. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pemerintah harus menjamin bahwa para Advokat:

- (a) Dapat melaksanakan semua fungsi profesional mereka tanpa intimidasi hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak selayaknya;
- (b) Dapat bepergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas di negara mereka sendiri dan di luar negeri;
- (c) Tidak akan mengalami, atau diancam dengan penuntutan atau sanksi administratif, ekonomi atau lainnya untuk setiap tindakan yang diambil sesuai dengan kewajiban, standar dan etika profesional¹⁷.

Ketidakidentikan antara Advokat dan kliennya tersebut sesuai dengan hukum keagenan, dimana agen hanya bertindak untuk dan atas nama, dan selama agen masih menjalankan tugas sesuai dengan tugas yang didelegasikan kepadanya dan dilakukan secara profesional, maka Advokat tersebut tidak dapat menjadi tanggung gugat, tetapi pihak prinsipallah yang harus bertanggung jawab secara hukum. Prinsip tidak menyamakan Advokat dengan kliennya disebut juga dengan prinsip pemisahan profesional (*professional detachment principle*) atau prinsip nonakuntabilitas (*nonaccountability*), yang diakui dengan tegas oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Landasan kerja Advokat sampai saat ini hanya menggunakan

¹⁶ Melina Anggraini, et all, "Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum", *El-Mutjama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3 No 3, Tahun 2023, hal 636

¹⁷ H. Teguh Samudera," "Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara PUU No. 63/PUU-XV/2017", https://www.dppferari.org/fungsi_dan_peran_advokat, diakses pada 10 oktober 2024

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai tatanan dalam menertibkan kerja mereka sendiri melalui berbagai Organisasi Advokat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Peran seorang Advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen Advokat sebagai penegak hukum mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana.
2. Hampir seluruh Advokat pernah berpartisipasi di dalam seminar, pelatihan, workshop, atau diskusi baik sebagai peserta maupun pembicara. Pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat kepada masyarakat, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat. Berpartisipasi dalam memberikan Masyarakat pelayanan hukum dan perlindungan hukum.

B. Saran

1. Peran advokat dalam upaya meningkatkan kewibawaan di masyarakat harus lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah dan memberikan bantuan hukum secara adil kepada setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.
2. Advokat diharapkan dapat lebih berpartisipasi dan lebih membaur ke kehidupan masyarakat untuk mengatasi permasalahan hukum di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, S,"*Etika Profesi Hukum*",Palembang,Refika,2019, hal 38

- Arief, B. N. 2007. "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bertens, K. 2004. "Etika", Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ke-8, Jakarta.
- Dermawan, M. K. 1994. "Strategi Pencegahan Kejahatan", Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hatta, S. G. M. 2000. "Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia", Alumni, Cetakan ke-2, Bandung.
- M. Ali Safa'at. Dkk. 2010. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Marzuki, P. M. 2011. "Penelitian Hukum", Prenada Media Grup, Jakarta.
- Muhammad, A. 1996. "Etika Profesi Hukum", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, A. 2003. "Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahman, S. & Nurul Qamar, 2014. "Etika Profesi Hukum", Refleksi, Makassar.
- Sarmadi, S, 2009, Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan), Mandar Maju, Bandung, hlm. 1
- Shidarta. 2009. "Moralitas Profesi Hukum", Refika Aditama: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Cetakan ke-2, Bandung.
- Soekanto, S. 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Jakarta.
- _____. 2005. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Rajawali Pers, Jakarta.
- _____. 2006. "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Bagian Umum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Jurnal

- Niru Anita Sinaga, 2009, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 2.

- Melina Anggraini, et all,"Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum", *El-Mutjama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3 No 3

Internet

Annisa,"*Penegakan Hukum*", Penegakan Hukum:
Pengertian, Faktor dan Tahapnya
(umsu.ac.id), diakses pada 10 oktober 2024

Direktori Putusan, Putusan Mahkamah Agung
Nomor 600k/TUN/2022

H. Fauzie Y. Hasibuan
<https://www.esaunggul.ac.id/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia/> diakses 10 April 2024.

H. Teguh Samudera," "Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara PUU No. 63/PUU-XV/2017", <https://www.dppferari.org/fungsi-dan-peran-advokat>, diakses pada 10 oktober 2024

Muhammad Faiz, "Pendidikan Hukum Berkelanjutan Bagi Advokat",
<https://www.hukumonline.com/Pendidikan-Hukum-Berkelanjutan-Bagi-Advokat>(hukumonline.com), diakses pada 13 oktober 2024

Rahmawati,"Peran Advokat terhadap Penegakan Hukum di Masyarakat",
<https://www.rri.co.id/hukum/Peran-Advokat-terhadap-Penegakan-Hukum-di-Masyarakat>, diakses pada 14 Oktober 2024

Syamsul Dwi Maarif, *Ciri-Ciri Negara Hukum*",
<https://tirto.id/Ciri-ciri-Negara-Hukum-Secara-Umum> Ada 4, Berikut Penjelasannya, diakses pada 14 oktober 2024

